

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraha, D. A., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Indrawan, H. (2021). Upaya Memenuhi Hak Pelayanan Dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 808-814.
- Subroto, M., & Muktya, Y. D. Y. (2024). Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8163-8174.
- IndahDewi, L., & Darmawan, D. (2021). PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS. 4. *Journal of Correctional*, (4), 127-131.
- Rafi' Athallah, I., & Subroto, M. (2021). Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 28-35.
- Hasanah, U. Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Provinsi NTB.
- Irham, M. T. I., Kusuma, J. D., & Megayati, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 609-620.
- Indahdewi, L., & Darmawan, D. (2021). THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN EFFORTS TO FULFILL THE RIGHTS OF PRISONERS WITH DISABILITIES. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 127-131.
- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. *Jakarta: BPHN*.
- Bulla, D., Pala, A., & Agustian, D. (2023). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KEFAMENANU. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(3), 127-138.

- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181-192.
- Putri, T. V., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita yang Tinggal dan Masuk Pada Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *UNES Law Review*, 6(1), 1187-1196.
- Putri, E. A., Khoiron, K., & Sekarsari, R. W. (2023). Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang-Orang Berkebutuhan Khusus. *Respon Publik*, 17(7), 20-27.
- Garnadi, R. A., & Pu, A. K. N. (2024). Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Adhyaksa, D. K., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Nafarizka, M. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 221-236.
- Fahlevi, R., Marzuki, M., & Muttaqien, A. (2024). ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN. *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Irham, M. T. I., Kusuma, J. D., & Megayati, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 609-620.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang Undang Pemasyarakatan No.22 tahun 2022 Pasal 7 dan Pasal 9 huruf (d)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan direktur jenral pemasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dengan Nomor PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang standar pelayanan pemasyarakatan